

Judul : Produksi pupuk murah kualitas tinggi, Presiden peduli nasib petani
Tanggal : Sabtu, 18 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Produksi Pupuk Murah Kualitas Tinggi

Presiden Peduli Nasib Petani

Senayan menyambut baik intruksi Presiden Prabowo Subianto ke Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan Presiden terhadap dunia pertanian dan kesejahteraan petani.

ANGGOTA Komisi IV DPR Usman Husin mengatakan, kebijakan ini akan meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. "Dengan instruksi Presiden ini, kualitas pupuk di Indonesia akan semakin baik," ujar Usman dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap sejumlah menteri di beberapa sektor strategis di bidang pertanian dalam Rapat Terbatas Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Presiden mengugaskan Menteri Pertanian untuk segera memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Gunanya untuk meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Usman melanjutkan, saat ini di pasaran beredar pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Pemerintah telah menetapkan harga pupuk bersubsidi sebesar Rp 2.250/kg untuk urea, Rp 2.300/kg untuk Nitrogen, Fosfat, Kalium (NPK), dan Rp 800/kg untuk

pupuk organik sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024.

Namun, ia menilai, masih banyak petani yang belum mengetahui besaran Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Akibatnya masih terjadi praktik penjualan di atas harga resmi.

Dengan ada intruksi Presiden tersebut, Usman berharap akan berdampak tidak hanya pada peningkatan produksi pertanian, tapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani. "Tidak boleh lagi ada petani yang hidup di bawah garis kemiskinan," tegas politikus PKB ini.

Untuk itu, ia meminta agar Kementan memastikan produksi dan distribusi pupuk dilakukan secara tepat sasaran. Instruksi Presiden ini harus dijalankan dengan pengawasan ketat agar tidak ada penyelewengan yang mencederai amanah Presiden.

"Pupuk berkualitas dan terjangkau harus benar-benar sampai ke tangan petani," tegas legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menambahkan, pupuk bersubsidi merupakan jantung produktivitas pertanian



Usman Husin

nasional, harus dikelola dengan baik agar benar-benar menyentuh kebutuhan petani kecil. "Kita tidak kekurangan pupuk secara nasional, karena kapasitas produksi nasional mencapai hampir 14 juta ton per tahun," ujarnya, kemarin.

Tetapi masalahnya, lanjut Johan, adalah bagaimana distribusi, akurasi, dan keadilannya di lapangan. Apalagi, Pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton tahun 2025. "Tapi tetap harus kita kawal agar benar-benar sampai ke petani yang berhak," tegas politikus PKS ini.

Johan lalu menyoroti adanya kesenjangan antara kebutuhan pupuk petani dan alokasi subsidi Pemerintah. Berdasarkan data Kementan kebutuhan pupuk nasional mencapai sekitar 23 juta ton, sementara alokasi subsidi hanya sekitar 9 juta ton.

"Hal ini menuntut optimalisasi

penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati agar produktivitas tetap terjaga tanpa membebani petani," kata dia.

Selain itu, Johan meminta Pemerintah mengembalikan semangat kemandirian dan inovasi pertanian. Caranya, pupuk organik seperti Petroganik dan NPK Pelangi harus terus didorong penggunaannya. "Ini bukan hanya soal subsidi, tapi keberlanjutan ekosistem pangan kita," tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto menegaskan, kebijakan baru Pemerintah mengenai distribusi pupuk telah membawa perubahan nyata di lapangan. Sistem yang lebih sederhana dan tepat sasaran dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Utamanya di daerah lumbung beras seperti Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumisel).

"Petani di Banyuasin sendiri mengaku tidak ada lagi hambatan berarti dalam mendapatkan pupuk bersubsidi," ujar Panggah dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

Panggah menjelaskan, penyerahan sistem distribusi pupuk merupakan hasil penerapan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6 Tahun 2025. Isinya, menetapkan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi hanya melibatkan dua institusi utama, yaitu Kementan dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Langkah ini memangkas rantai birokrasi dan mempercepat pe-

ngawasan terhadap perencanaan, produksi, dan distribusi pupuk. Sehingga produksi, perencanaan, dan distribusi pupuk bisa dikontrol lebih efektif. "Jadi tidak lagi berlapis seperti dulu," ujar politikus Golkar ini.

Panggah menegaskan, kelancaran distribusi pupuk menjadi salah satu fondasi utama untuk mencapai target swasembada pangan nasional tahun 2027. Hal ini sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Keberhasilan sistem distribusi pupuk di Banyuasin dapat menjadi model nasional untuk diterapkan di daerah lain. "Banyuasin ini contoh nyata sistem distribusi yang efisien. Jadi petani lebih tenang, produktivitas naik, dan daya saing hasil pertanian ikut meningkat," tegasnya.

Komisi IV DPR, kata Panggah, siap melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi dengan memastikan setiap kebijakan Pemerintah benar-benar berdampak bagi petani. Sebab, kebijakan pupuk menjadi satu dari tiga faktor kunci yang menentukan keberhasilan program pangan nasional.

Dua faktor kunci lainnya yaitu ketersediaan benih unggul dan perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi serta akses jalan. "Bila pupuk, benih, dan infrastruktur berjalan serempak, maka target swasembada pangan bukan lagi sekadar wacana dan kita bisa mencapainya pada 2027," pungkas Panggah. ■ TIF